



FENOMENA VICTIM BLAMING DALAM KASUS PELECEHAN: KEBIASAAN BURUK YANG TERUS DINORMALISASI

Sarah Nur Azizah, Mirna Nur Alia, Muhammad Retsa Rizaldi Mujayapura

Pendidikan Sosiologi, Fakultas Pendidikan Indonesia, Universitas Pendidikan Indonesia

Abstrak

Victim blaming dalam kasus pelecehan seksual masih menjadi permasalahan yang terus terjadi di Indonesia. Fenomena ini terjadi ketika korban justru disalahkan atas tindakan yang mereka alami, baik karena pakaian, perilaku, atau situasi tertentu. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana victim blaming dalam kasus pelecehan seksual masih dinormalisasi oleh masyarakat, serta faktor-faktor yang memperkuatnya, seperti seksisme, patriarki, dan kurangnya edukasi seksual. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi, didukung oleh analisis wacana dari berbagai kasus yang terjadi di media sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa victim blaming tidak hanya berasal dari individu, tetapi juga dipengaruhi oleh budaya patriarki yang mengakar serta kurangnya pemahaman tentang pelecehan seksual. Namun, media sosial juga berperan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat dan menjadi alat untuk melawan victim blaming. Oleh karena itu, edukasi mengenai pelecehan seksual dan bahaya victim blaming perlu diperluas agar korban mendapatkan dukungan yang layak dan pelak.

Kata Kunci: victim blaming, pelecehan seksual, media sosial.

PENDAHULUAN

Pelecehan seksual bukanlah kasus yang langka terjadi di Indonesia. Data real time Simfoni PPA mencatat bahwa dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2024 terdapat 29.658 kasus kekerasan dengan 80% korbannya merupakan perempuan dan kekerasan seksual menjadi bentuk kekerasan paling

banyak yaitu mencapai 13.413 kejadian (Shabrina, 2024). Tidak sedikit dari kasus kekerasan seksual dan pelecehan seksual tersebut justru masyarakat malah menyalahkan korban atas kejadian yang menimpanya. Fenomena dimana korban disalahkan atas kejadiannya disebut juga victim blaming. Victim blaming merupakan keadaan dimana korbanlah yang disalahkan

*Correspondence Address : saraaaahazizah09.upi@edu
DOI : 10.31604/jips.v12i6.2025. 2361-2368
© 2025UM-Tapsel Press

dalam suatu tindakan kejahatan dan korban diharuskan bertanggung jawab atas kejahatan yang terjadi kepada mereka (Shopiani et al., 2021).

Perempuan yang pernah mengalami kekerasan seksual atau pelecehan seksual juga menerima pandangan negatif yang berbentuk terdiskualifikasi dari penerimaan lingkungan sosial atau keadaan dimana tidak diterima sepenuhnya (Rukman et al., 2023). Korban seringkali dikucilkan dalam kehidupan sosial dimana seharusnya dihindari karena korban pastinya perlu dukungan dan motivasi (Jofipasi et al., 2024). Ketika seharusnya mendapat dukungan korban malah disalahkan bahkan dikucilkan dari lingkungannya. Banyak dampak yang terjadi kepada korban pelecehan seksual yang mengalami victim blaming seperti tidak merasa percaya diri, gangguan mental, dan lainnya. Salah satu dampak dari victim blaming adalah ketika korban justru takut untuk melaporkan kejadian yang mereka alami karena takut akan dihina dan tidak akan mendapatkan perlindungan (Putri & Kusnadi, 2024). Dampak lain dari victim blaming adalah korban justru menyalahkan dirinya sendiri atas kejadian yang menimpanya, karena kebanyakan orang disekitarnya menyalahkan dirinya korban jadi berpikiran bahwa memang ialah yang bersalah. Self-blame merupakan perilaku dimana seorang individu percaya bahwa dirinya adalah penyebab suatu kejadian yang menimpanya (Surya & Soegijapranata, 2024).

Di Indonesia sendiri sudah tidak asing dengan yang namanya Victim blaming. Di tahun 2024, ramai di media sosial seorang penyanyi dangdut disawer dan secara tiba tiba dicitum oleh seorang bapak bapak, sang penyanyi dangdut memukul tangan bapak bapak tersebut sebagai perlawanan. Bapak tersebut sempat turun dari panggung, namun beberapa saat kemudian bapak itu naik lagi dan menendang penyanyi dangdut

hingga mengenai perut bagian bawah. Kejadian itu ramai di media sosial, namun respon dari warganet justru menyalahkan penyanyi dangdut tersebut karena dinilai bahwa bajunya kurang sopan, ada juga warganet yang berpendapat bahwa kejadian yang menimpa penyanyi itu merupakan hal yang sudah biasa menimpa seorang penyanyi dangdut (Cahyanti, 2024).

Rendahnya pengetahuan masyarakat akan pelecehan seksual serta budaya Patriarki yang masih mengakar merupakan alasan mengapa kasus victim blaming masih sering terjadi. Menurut KBBI patriarki merupakan tata kekeluargaan yang mementingkan garis keturunan bapak. Istilah patriarki disini menggambarkan sistem sosial dimana laki-laki merupakan kelompok yang mendominasi dan mengendalikan kekuasaan terhadap kelompok perempuan. Dengan adanya pemahaman tentang ini membuat masyarakat percaya bahwa kedudukan kaum laki-laki lebih tinggi dibandingkan perempuan (Halizah & Faralita, 2023)

Selain itu juga terdapat ketidakadilan gender dimana perempuan yang bersolek atau bahkan seperti penyanyi dangdut tadi dinilai mengundang lawan jenis untuk melakukan tindakan pelecehan seksual. Hal ini yang menyebabkan victim blaming semakin dinormalisasi, padahal jika ditelusuri lebih jauh, kecil kemungkinan perempuan yang memiliki niat untuk menggoda atau bahkan secara terang-terangan ingin dilecehkan oleh lawan jenis.

Media sosial merupakan sarana penyebaran berita yang sangat cepat dan siapa pun dapat menyebarkan suatu peristiwa dengan cepat, hal ini membuat media sosial rentan terhadap victim blaming. Victim blaming dalam media sosial biasanya terjadi ketika masyarakat menilai korban dengan menulis komentar dalam postingan yang

menyudutkan korban (Firmanda et al., 2023)

Fenomena victim blaming dalam kasus pelecehan seksual masih menjadi masalah yang terus dinormalisasi di Indonesia. Adapun maksud dari tulisan ini adalah peneliti ingin menganalisis lebih jauh bagaimana victim blaming dalam kasus pelecehan terjadi. Dengan menggunakan hasil wawancara dari beberapa narasumber yang pernah mengalami victim blaming, harapannya dapat memberikan wawasan yang lebih kepada masyarakat Indonesia mengenai bahaya dari victim blaming baik bagi korban maupun terhadap pola pikir masyarakat mengenai kasus ini.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi untuk memahami pengalaman korban yang mengalami victim blaming dalam kasus pelecehan seksual. Pendekatan ini dipilih karena bertujuan untuk menggali pengalaman subjektif korban serta bagaimana masyarakat membentuk narasi victim blaming terhadap mereka. Data diperoleh melalui wawancara dengan korban pelecehan seksual serta analisis wacana terhadap berbagai komentar di media sosial yang membahas fenomena victim blaming.

Analisis data dilakukan dengan pendekatan interpretatif untuk memahami pola-pola victim blaming yang muncul dalam berbagai kasus. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji bagaimana faktor seperti seksisme, patriarki, dan kurangnya edukasi berkontribusi terhadap normalisasi victim blaming dalam masyarakat. Dengan metode ini, penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih mendalam mengenai bagaimana victim blaming terjadi serta bagaimana media sosial

dapat menjadi alat dalam menyuarakan perlawanan terhadap fenomena ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Victim blaming atau keadaan dimana korban disalahkan dalam kasus pelecehan seksual bukanlah hal yang jarang terjadi. Alih-alih mendapatkan dukungan, banyak korban dari pelecehan seksual justru disalahkan atas kejadian yang menimpa mereka. Bentuk dari victim blaming muncul dari banyak cara, mulai dari anggapan bahwa pelecehan hanyalah sebuah candaan sehingga stigma yang menyalahkan pakaian yang dipakai saat kejadian atau perilaku dan kebiasaan korban. Campbell & Raja (1999 dalam Wulandari & Krisnani, 2021) Bentuk-bentuk menyalahkan korban dapat berupa tidak mempercayai cerita korban, merendahkan seberapa parah dampak yang diterima oleh korban, dan perlakuan yang acuh kepada korban pasca kejadian. Berdasarkan hasil penelitian, ada beberapa bentuk victim blaming yang korban dapatkan. Beberapa korban dinilai terlalu sensitif saat menerima pelecehan seksual, karena banyak pelaku yang menganggap bahwa pelecehan seksual hanyalah candaan semata. Pelaku terkadang merasa bahwa apa yang mereka perbuat hanyalah sebuah candaan, pelaku tidak menyadari bahwa akibat yang ditimbulkan atas perbuatannya dapat berdampak kepada mental atau keadaan psikis korban yang mengalami hal tersebut (Alhakim, 2021).

Beberapa korban lain dianggap wajar mengalami pelecehan seksual oleh masyarakat, hanya karena bentuk tubuh korban yang dinilai dapat mengundang tindakan pelecehan seksual. Selain itu bentuk lain dari victim blaming seperti pulang terlalu larut, pakaian terlalu terbuka, dan dianggap tidak hati hati sering dilontarkan kepada korban yang mengalami pelecehan seksual. Beberapa hal diatas dapat berdampak buruk bagi

korban yang mengalami victim blaming. Ada korban yang merasa insecure atas bentuk tubuhnya, beberapa korban juga jadi merasa takut atau khawatir akan disalahkan kembali jika mengadu. Banyak korban yang khawatir untuk melaporkan kasus yang menimpa pada dirinya karena takut akan menerima stigma negatif dari masyarakat (Shopiani et al., 2021). Dampak lainnya dari victim blaming adalah ketika korban justru malah menyalahkan dirinya sendiri ketika mengalami pelecehan seksual. Ketika korban mengalami pelecehan seksual lalu ketika mencari perlindungan tetapi malah disalahkan atas kejadian yang menimpanya, korban justru berpikiran bahwa memang kesalahannya bersumber dari diri korban itu sendiri. Menurut Inayah & Palila (2022 dalam Isabela et al., 2024) dengan adanya dukungan dari orang-orang terdekat dan juga mendapatkan empati terhadap sesama seharusnya dapat memberikan kekuatan tersendiri bagi korban agar dapat bangkit dan berhenti menyalahkan dirinya sendiri atas kejadian yang menimpanya. Namun jika tidak ada dukungan dari orang terdekat dan korban semakin dibuat merasa bersalah atas kejadian tersebut dapat memperburuk keadaan korban.

Perlindungan hukum bagi korban pelecehan seksual masih belum maksimal, hal ini disebabkan oleh belum maksimalnya fungsi sistem hukum (Rosnawati, 2022). Belum maksimalnya fungsi sistem hukum menjadi faktor mengapa pelaku pelecehan seksual tidak takut dan tidak jera saat melakukan tindakan tersebut. Selain itu pemerintah sendiri juga belum bisa membuat upaya untuk mengurangi atau mengedukasi perihal victim blaming terhadap korban pelecehan yang mengalami victim blaming, hal ini yang membuat victim blaming masih terus terjadi di masyarakat. Berbagai faktor sosial berperan dalam mempertahankan pola pikir ini. Menurut Salama (2013 dalam

Nugroho & Rakhman, 2022) Seksisme adalah suatu bentuk diskriminasi atau prasangka dari suatu kelompok kepada kelompok lainnya hanya karena adanya perbedaan gender atau jenis kelamin. Tindakan ini dapat terjadi karena adanya stereotip bahwa posisi laki-laki memiliki posisi yang lebih tinggi dan superior. Seksisme juga dapat menjadi salah satu faktor adanya victim blaming. Seksisme merupakan salah satu masalah kekerasan seksual atau pelecehan seksual, contohnya adalah ketika terdapat komentar yang bersifat mengancam atau memperlakukan suatu gender layaknya bawahan (Ardi Wiyatno, Sheila Alma Tasya, Abdul Rahim, 2024). Pola pikir seksisme merupakan pola pikir menormalisasi diskriminasi antar gender dan juga menciptakan standar ganda dalam kasus pelecehan seksual. Dengan adanya diskriminasi antar gender dalam kasus pelecehan seksual dapat menyebabkan penempatan perempuan dalam posisi rentan untuk disalahkan. Selain itu dengan adanya seksisme dalam kasus pelecehan seksual dapat membuat victim blaming dianggap hal yang normal. Contohnya ketika anak perempuan menjadi korban pelecehan seksual karena di malam hari orang-orang akan menyalahkan korban karena pulang terlalu larut, sedangkan untuk anak laki-laki bebas untuk keluar semalam apapun.

Menurut KBBI, patriarki dapat diartikan sebagai perilaku yang lebih mengutamakan laki-laki daripada perempuan di dalam masyarakat atau kelompok sosial tertentu. Tidak dapat dipungkiri bahwa sistem patriarki yang masih mengakar kuat dalam masyarakat Indonesia juga menjadi alasan mengapa korban masih disalahkan atas kejadian yang menimpanya. Dengan adanya paradigma patriarki ini yang membentuk suatu pola pikir pada masyarakat, termasuk pelaku ekonomi, kaum-kaum intelektual, dan juga penentu suatu kebijakan dalam memperlakukan

perempuan, hal ini juga menyebabkan terbentuknya sebuah budaya yang mengakar pada masyarakatnya (Halizah & Faralita, 2023). Pola pikir tersebut membuat perempuan dianggap sebagai makhluk yang lemah, banyak keterbatasan, selalu menggunakan perasaan dan tidak logis. Seperti hasil wawancara ketika korban dianggap berlebihan dalam menanggapi pelecehan seksual yang dialaminya, hal tersebut bisa dikarenakan pola pikir masyarakat yang selalu menganggap bahwa perempuan selalu menggunakan perasaan dan tidak berpikir logis. Dengan adanya pandangan tersebut, ketika perempuan menghadapi pelecehan seksual dapat dianggap terlalu membawa perasaan. Selain itu berdasarkan hasil wawancara juga perempuan disalahkan karena tidak melawan, masyarakat sekitar yang memiliki pola pikir patriarki selalu menganggap perempuan lemah. Hal ini membuat masyarakat berpikir ketika seorang perempuan dihadapkan dalam suatu kasus pelecehan seksual, perempuan terlalu lemah dan tidak bisa melawan serta menjaga dirinya dengan baik. Selain itu, patriarki juga membuat pelaku pelecehan sering dimaklumi. Banyak orang percaya bahwa laki-laki memiliki nafsu yang besar dan sulit dikendalikan, sehingga perempuanlah yang harus menjaga diri. Pemikiran seperti ini tidak hanya membebankan korban, tetapi juga membuat pelaku seolah terbebas dari tanggung jawab atas perbuatannya.

Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap pelecehan seksual juga merupakan alasan mengapa victim blaming menjadi suatu hal yang wajar untuk masyarakat. Suatu lingkungan yang memiliki pendidikan tinggi mampu menaruh korban di posisi yang seharusnya dilindungi dengan dukungan yang penuh (Latra Wijayanti & Suarya, 2023). Menurut Durex Indonesia (2017)

84% remaja di Indonesia dengan rentang usia 12-17 tahun masih belum menerima dan mengetahui pendidikan seksual. Di tahun 2019 Durex Indonesia juga mengatakan bahwa 33% remaja Indonesia sudah aktif secara seksual, bahkan 58%nya merupakan remaja usia 18-20 tahun. Dalam survei itu juga menyatakan bahwa 50% remaja melakukan hubungan seksual tanpa menggunakan alat kontrasepsi. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kebutuhan akan edukasi mengenai seks sangatlah tinggi (Retania et al., 2024). Namun pada kenyataannya edukasi mengenai seks belum diterapkan di rumah maupun di sekolah karena banyak orang tua dan guru yang beranggapan bahwa edukasi mengenai seks ini sangatlah tabu untuk dibicarakan kepada anak usia dini maupun remaja (Hi.Yusuf, 2020). Bahkan pembicaraan mengenai edukasi seks dianggap seolah-olah suatu hal yang berbau porno, padahal tanpa adanya edukasi dari lembaga profesional dapat membuat anak penasaran dan mencari di media sosial mengenai seks. Bahaya media sosial untuk anak dibawah umur tanpa edukasi mengenai seks, banyak konten dewasa yang belum dapat dipahami oleh anak. Bahkan banyak film dewasa yang meromantisasikan kasus pelecehan seksual. Hal itu dapat menyebabkan hal yang fatal apabila tidak didampingi oleh orang dewasa. Dalam hasil wawancara, korban mengalami pelecehan seksual secara verbal dan pelakunya merupakan anak sekolah menengah pertama (SMP) dimana mereka seharusnya sudah mengetahui bahwa hal itu merupakan hal yang salah, namun karena kurangnya edukasi mengenai seks hal itu dapat terjadi. Selain itu karena usia anak SMP yang tergolong masih dibawah umur, kasus pelecehan ini dianggap normal karena pelaku dianggap masih kecil untuk mengerti bahwa hal ini merupakan hal yang salah. Bahkan tidak sedikit pelaku

tidak sadar bahwa perbuatan yang mereka lakukan merupakan suatu tindakan pelecehan karena kurangnya edukasi.

Media sosial juga menjadi platform berbahaya bagi remaja maupun anak dibawah umur yang belum belajar tentang edukasi seks. Banyak remaja yang mempelajari tentang seks & pelecehan dari media sosial. Seperti konten media sosial, film, grup chat, bahkan komentar pada suatu postingan. Salah satunya dalam film *Dear David*, film ini dapat memunculkan sikap normalisasi dan juga romantisasi terhadap kasus pelecehan seksual pada remaja apabila penonton kurang memahami konteks dalam film tersebut (Octavia & Yuwono, 2024). Kurangnya edukasi tentang seks membuat penonton lebih fokus terhadap adegan seks dibandingkan terhadap makna dari film tersebut, dan kurangnya pemahaman terhadap seks membuat penonton beranggapan bahwa pelecehan seksual merupakan perilaku yang normal bahkan romantis, dimana tindakan seperti memaksa ciuman, menyentuh tanpa izin atau mengejar secara obsesif justru digambarkan sebagai bentuk cinta yang tulus. Akibat dari hal ini adalah orang-orang tidak mengetahui batasan antara tindakan romantis dan pelecehan, sehingga perilaku pelecehan malah dianggap wajar. Terlalu terbukanya akses ke konten-konten juga menjadi bahaya bagi anak dibawah umur dan remaja. Media massa memberi efek yang sangat kuat dan bisa mempengaruhi pandangan seseorang akan dunia yang dipandangnya, oleh karena itu penting bagi seseorang untuk memfilter konten-konten terhadap medianya masing-masing (Meilinda et al., 2020).

Media sosial dapat menjadi wadah yang positif apabila penggunaannya menggunakan media sosial dengan bijak, sesuai dengan usianya, kebutuhan, dan mengerti batasan yang seharusnya. Pada tanggal 22 Maret 2025, akun

@urneuville memagikan unggahannya yang berisikan foto kolom komentar zoom meeting. Komentar itu bertuliskan 'Mohon maaf bu dalam kekeerasan seksual korban sama sekali tidak salah. Selain itu mengungkit kasus kekeerasan seksual tanpa persetujuan korban juga merupakan kekerasan seksual'. Unggahan ini ramai diperbincangkan oleh warganet bahkan postingan ini sampai diposting ulang oleh beberapa akun besar. Respon warganet dalam unggahan ini menunjukkan bahwa ternyata tidak sedikit masyarakat yang paham bahwa *victim blaming* merupakan hal yang salah. Bahkan dengan adanya postingan itu membuat masyarakat yang awalnya tidak paham menjadi sadar akan bahaya dampak dari *victim blaming* baik bagi korban maupun bagi orang-orang yang memiliki pola pikir bahwa *victim blaming* adalah hal yang normal. Hal ini menjadi bukti bahwa media sosial dapat menjadi suatu wadah yang positif apabila digunakan dengan baik. Dengan semakin luasnya diskusi mengenai *victim blaming* terhadap kasus pelecehan seksual, diharapkan akan ada lebih banyak edukasi dan kebijakan yang menguntungkan baik bagi korban maupun masyarakat. Masyarakat juga berperan penting dalam mengubah narasi dan media sosial dapat dimanfaatkan sebagai ruang yang lebih aman untuk mendukung korban serta melawan normalisasi dari *victim blaming*.

SIMPULAN

Victim blaming dalam kasus pelecehan seksual masih menjadi fenomena yang terus berulang di masyarakat, didorong oleh berbagai faktor seperti seksisme, patriarki, dan kurangnya edukasi tentang pelecehan seksual. Banyak korban justru disalahkan atas kejadian yang menimpa mereka, baik karena pakaian, perilaku, maupun situasi tertentu. Hal ini

menunjukkan bahwa victim blaming bukan hanya sekadar opini individu, tetapi juga merupakan hasil dari pola pikir sosial yang telah mengakar.

Namun, di sisi lain, media sosial memainkan peran penting dalam mengubah persepsi masyarakat terhadap victim blaming. Meskipun sering menjadi tempat penyebaran narasi yang menyalahkan korban, media sosial juga dapat menjadi alat edukasi dan advokasi untuk melawan victim blaming. Dukungan yang diberikan oleh warganet terhadap korban menunjukkan bahwa kesadaran akan isu ini mulai meningkat, meskipun masih banyak tantangan yang harus dihadapi. Oleh karena itu, diperlukan upaya lebih lanjut untuk menghapus victim blaming dan menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi korban pelecehan seksual.

Untuk mengurangi victim blaming dalam kasus pelecehan seksual, diperlukan upaya dari berbagai pihak. Edukasi mengenai pelecehan seksual dan victim blaming harus ditingkatkan sejak dini, baik melalui institusi pendidikan, keluarga, maupun media. Pemahaman tentang batasan, persetujuan (consent), dan dampak victim blaming perlu disosialisasikan secara luas agar masyarakat tidak lagi menyalahkan korban atas kejadian yang menimpa mereka. Selain itu, pemerintah dan lembaga terkait perlu mengambil langkah tegas dalam melindungi korban dengan memperkuat regulasi serta memastikan penegakan hukum yang tidak memberi ruang bagi victim blaming.

Peran media sosial juga sangat penting dalam membentuk persepsi publik terhadap victim blaming. Meskipun sering menjadi tempat penyebaran narasi yang menyalahkan korban, media sosial juga dapat digunakan sebagai alat edukasi dan advokasi untuk melawan victim blaming. Oleh karena itu, pengguna media sosial

perlu lebih aktif dalam menyebarkan informasi yang benar serta mendukung korban agar merasa aman untuk bersuara. Selain itu, masyarakat harus lebih peka dalam memberikan dukungan moral kepada korban pelecehan seksual, bukan justru menyalahkan mereka atas kejadian yang terjadi.

Lebih jauh, kesadaran akan bahaya budaya patriarki dalam victim blaming juga perlu ditumbuhkan. Diskusi dan kampanye mengenai bagaimana patriarki memperkuat victim blaming harus diperluas agar pola pikir yang menyalahkan korban dapat diubah secara bertahap. Dengan adanya kesadaran kolektif dan dukungan dari berbagai pihak, diharapkan victim blaming dapat berkurang, sehingga korban pelecehan seksual dapat memperoleh keadilan dan perlindungan yang layak.

DAFTAR PUSTAKA

Alhakim, A. (2021). ANALISIS HUKUM CATCALLING DAN PEMENUHAN ASAS BHINNEKA TUNGGAL IKA TERHADAP PERATURAN DAERAH KOTA BATAM DALAM MENCEGAH PELECEHAN SEKSUAL VERBAL. 9(3), 6.

Ardi Wiyatno, Sheila Alma Tasya, Abdul Rahim, S. R. A. (2024). Pengaruh Pemberian Video Informasi Kesamaan antar Gender Terhadap Seksisme Pada Mahasiswa Ardi Wiyatno 1, Sheila Alma Tasya 2, Abdul Rahim 3, Syahirah Rizki Anila 4. 2(1), 26–32.

Cahyanti, E. (2024). Seorang Penyanyi Dangdut Dilecehkan Tapi Malah Dihujat Warganet, Stop Victim Blaming! Konde.Co. <https://www.konde.co/2024/08/seorang-penyanyi-dangdut-dilecehkan-tapi-malah-dihujat-warganet-stop-victim-blaming/>

Firmanda, H., Azlina, I. I. S., & Septipah, I. (2023). Perlindungan Korban Kekerasan Seksual yang Mengalami Victim Blaming di Media Sosial Berdasarkan Aliran Realisme Hukum. Reformasi Hukum, 27(1), 38–49. <https://doi.org/10.46257/jrh.v27i1.489>

- Halizah, L. R., & Faralita, E. (2023). Budaya patriarki dan kesetaraan gender. *Wasaka Hukum*, 11(1), 19–32. <https://www.ojs.stihsa-bjm.ac.id/index.php/wasaka/article/view/84>
- Hi.Yusuf, H. (2020). Pentingnya Pendidikan Seks Bagi Anak. *Al-Wardah*, 13(1), 131. <https://doi.org/10.46339/al-wardah.v13i1.163>
- Isabela, C. C., Nabila, N. A., Evitananda, S., Azizah, S. N., & Kaloeti, D. V. S. (2024). Efektivitas Post Traumatic Growth Pada Wanita Korban Kekerasan Seksual Ditinjau Dari Resiliensi: Systematic Literature Review. *Jurnal Darma Agung*, 32(2), 812–822.
- Jofipasi, T. A., Karneli, Y., & Netrawati, N. (2024). Implementasi Konseling Eksistensial dalam Mengatasi Trauma Pada Korban Pelecehan Seksual. *Counselia; Jurnal Bimbingan Konseling Pendidikan Islam*, 5(1), 151–161. <https://doi.org/10.31943/counselia.v5i1.108>
- Latra Wijayanti, N. S. T. P., & Suarya, L. M. K. S. (2023). Fenomena Victim Blaming Pada Korban Kekerasan Seksual. *Psychopolytan : Jurnal Psikologi*, 7(1), 12–20. <https://doi.org/10.36341/psi.v7i1.3072>
- Meilinda, N., Malinda, F., & Aisyah, S. M. (2020). Literasi Digital Pada Remaja Digital (Sosialisasi Pemanfaatan Media Sosial Bagi Pelajar Sekolah Menengah Atas). *Jurnal Abdimas Mandiri*, 4(1), 62–69. <https://doi.org/10.36982/jam.v4i1.1047>
- Nugroho, M. A. B., & Rakhman, Y. (2022). Analisis Terjemahan Ujaran Seksisme Dan Pelecehan Seksual Dalam Subtitle Bahasa Indonesia Di Dalam Film Red Sparrow. *Fon: Jurnal Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia*, 18(1), 26–35. <https://doi.org/10.25134/fon.v18i1.4497>
- Octavia, R., & Yuwono, A. P. (2024). Analisis Resepsi Penonton terhadap Makna Normalisasi Pelecehan Seksual pada Film Dear David. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 8(1), 11–23. <https://doi.org/10.30596/ji.v8i1.14608>
- Putri, A., & Kusnadi, S. (2024). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN VICTIM BLAMING DALAM ALIRAN REALISME HUKUM PADA KASUS KEKERASAN SEKSUAL. *Issn (E)*, 8(1), 2580–3883. <https://doi.org/10.24269/ls.v8i1.8545>
- Retania, V. A., Hasfi, N., & Luqman, Y. (2024). Pendidikan Seksual Online Untuk Remaja: Narasi Konten Dan Komentar Di Tabu.Id. *Jurnal Pendidikan Psikologi*, 1(2), 1–23.
- Rosnawati, E. (2024). Perlindungan Hukum bagi Perempuan Korban Pelecehan Seksual yang Dilakukan di Ruang Publik. *Jurnal Mercatoria*, 15(2), 95–102. <https://doi.org/10.31289/mercatoria.v15i2.7616>
- Rukman, R., Huriani, Y., & Shamsu, L. S. binti H. (2023). Stigma terhadap Perempuan Korban Kekerasan Seksual. *Jurnal Iman Dan Spiritualitas*, 3(3), 447–454. <https://doi.org/10.15575/jis.v3i3.29853>
- Shabrina, D. (2024). Sederet Kasus Kekerasan Seksual yang Jadi Sorotan Publik Sepanjang 2024. *Tempo*. <https://www.tempo.co/hukum/sederet-kasus-kekerasan-seksual-yang-jadi-sorotan-publik-sepanjang-2024-1188112>
- Shopiani, B. S., Wilodati, W., & Supriadi, U. (2021). Fenomena Victim Blaming pada Mahasiswa terhadap Korban Pelecehan Seksual. *Sosietas*, 11(1), 13–26. <https://doi.org/10.17509/sosietas.v11i1.36089>
- Surya, A. P., & Soegijapranata, U. (2024). PERILAKU MENYALAHKAN DIRI DAN PERSEPSI BUDAYA PATRIARKI PADA PEREMPUAN KORBAN PELECEHAN SEKSUAL SELF-BLAME AND PERCEPTIONS OF PATRIARCHAL CULTURE IN SEXUAL HARASSMENT VICTIMS. 7(2), 152–163.
- Wulandari, E. P., & Krisnani, H. (2021). Kecenderungan Menyalahkan Korban (Victim-Blaming) Dalam Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Sebagai Dampak Kekeliruan Atribusi. *Share: Social Work Journal*, 10(2), 187. <https://doi.org/10.24198/share.v10i2.31408>